

Nelayan Kecil, Kunci Perbaikan Data Produksi Perikanan Tangkap Nasional

- *Pencatatan data produksi hasil tangkapan ikan di Indonesia selama ini wajib dilakukan oleh kapal-kapal ikan berukuran di atas 30 gros ton (GT). Kewajiban tersebut harus dilakukan, agar Negara bisa mendapatkan data produksi tangkapan ikan secara nasional dengan akurat.*
- *Namun, kapal-kapal berukuran 30 GT ke atas diduga kuat masih banyak yang melakukan pelaporan dengan nilai di bawah hasil tangkapan (under reported) dan itu menjadi salah satu faktor kenapa selama puluhan tahun data produksi nasional belum bisa diandalkan*
- *Adalah regulasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/Per-MenKP/2014 tentang Logbook Penangkapan Ikan yang membuka pintu penghalang antara kapal berukuran di atas dan di bawah 30 GT selama ini*
- *Dengan regulasi tersebut, kapal-kapal ikan berukuran di atas 5 GT diwajibkan untuk melaporkan hasil tangkapan melalui sistem pencatatan logbook yang sudah diperbarui dengan e-logbook. Namun, sistem baru tersebut juga ada tantangan, karena nelayan belum terbiasa mencatat produksi tangkapan selama ini*

Upaya perbaikan data produksi pada perikanan tangkap terus dilakukan Pemerintah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Perbaikan kualitas menjadi fokus, karena selama puluhan tahun terakhir, ketersediaan data produksi perikanan tangkap masih belum bisa diandalkan. Kondisi tersebut harus diperbaiki, karena pasar menuntut data yang handal dan akurat untuk saat ini dan masa mendatang.

Demikian diungkapkan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) M Zulficar Mochtar di Jakarta, dua pekan lalu. Komitmen Pemerintah untuk memperbaiki praktik perikanan berkelanjutan pada sektor perikanan tangkap, di antaranya adalah dengan meningkatkan kualitas data produksi perikanan tangkap.

“Upaya yang dilakukan adalah dengan memperbaiki sistem pendataan melalui sistem *logbook* penangkapan ikan,” ucapnya.

Zulficar menekankan, pentingnya Indonesia memperbaiki kualitas data produksi perikanan tangkap, karena itu akan berkaitan dengan sistem ketertelusuran hasil tangkapan ikan bagi pasar. Selain itu, kualitas data juga akan memberi manfaat dan rencana bisnis bagi para pelaku usaha, dan sekaligus juga berfungsi sebagai tata kelola perikanan nasional.



Warga Nelayan, Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Malang, dan Sahabat Alam Indonesia bersinergi melakukan penanaman Fish Apartement. Hal itu dilakukan, salah satu bentuk upaya mengembalikan terumbu karang di Kondang Merak, Malang, Jatim. Foto : Falahi Mubarak/ Mongabay Indonesia

Adapun, penggunaan sistem *logbook* penangkapan ikan menjadi cara yang efektif untuk memperbaiki kualitas data, karena sistem tersebut adalah bertujuan untuk mendapatkan hasil tangkapan yang akurat, terkini (*up to date*), dan objektif. Data yang dimasukkan ke dalam sistem *logbook*, selanjutnya akan menjadi bagian dari alokasi sumber daya ikan (SDI) dan usaha penangkapan ikan.

“Juga untuk mengetahui produktivitas kapal dan penangkapan ikan, serta pelaporan data ke RFMO (organisasi pengelolaan perikanan regional),” tuturnya.

Perbaikan kualitas data produksi penangkapan ikan tersebut, juga mendapat dukungan penuh dari Lembaga Pangan Dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO). Perbaikan data harus dilakukan, karena FAO menilai itu akan memperkuat pendataan perikanan skala kecil, seperti nelayan tradisional.

Transformasi *Logbook*



FAO menilai, karakteristik nelayan tradisional yang sebagian besar nelayan kecil di Indonesia masih setia menggunakan sistem pencatatan hasil tangkapan ikan yang belum optimal. Metode tersebut dinilai harus diperbarui dan diperbaiki untuk kebaikan mereka dalam bersaing dengan nelayan modern.

Agar nelayan kecil bisa berkembang dan memperbaiki sistem pencatatan hasil tangkapan ikan, FAO memberikan dukungan peningkatan

kapasitas nelayan dan Pemerintah daerah, sekaligus melaksanakan perluasan program *logbook* penangkapan ikan di enam kabupaten, yaitu Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Cirebon (Jawa Barat), Kabupaten Pati dan Kabupaten Cilacap (Jawa Tengah), serta Kabupaten Lamongan dan Probolinggo (Jawa Timur).

Ikan merupakan sumber pendapatan masyarakat

Zulficar menambahkan, dengan adanya transformasi sistem pendataan produksi perikanan tangkap dari *logbook* manual menjadi *e-logbook*, maka kualitas pendataan hasil tangkapan ikan nelayan Indonesia diyakini akan semakin lebih baik. Namun, agar sistem aplikasi tersebut bisa bermanfaat, Pemerintah Indonesia terus meningkatkan jangkauan dan tingkat pemanfaatannya ke semua nelayan.

Menurut dia, selain faktor efisiensi, penggunaan *e-logbook* juga akan lebih mudah digunakan oleh nelayan kecil dan nakhoda kapal perikanan. Dengan demikian, pencatatan data produksi hasil penangkapan ikan juga akan semakin mudah dilakukan oleh mereka. Sejauh ini, penggunaan *e-logbook* sudah dipakai oleh 6.000 kapal ikan.

“Ditargetkan akan mencapai 10 ribu kapa pada akhir tahun ini,” sebutnya optimis.

Bagi Pemerintah Indonesia, dukungan penuh dari FAO akan berdampak signifikan pada jangkauan pengguna *logbook* di seluruh Indonesia dan itu akan berimplikasi pada perbaikan tata kelola perikanan secara langsung. Mengingat, pola pemanfaatan SDI akan bisa dipetakan dengan lebih baik.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan KKP Syahril Abdul Raup menyatakan, perbaikan sistem *logbook* sudah dilakukan sejak 2018 dan sekaligus menjadi tahapan awal penerapan sistem *e-logbook*. Pembaruan tersebut harus dilakukan, karena Pemerintah ingin jangkauan penerapan *logbook* bisa lebih jauh lagi sampai kapal ikan berukuran di bawah 30 gros ton (GT).

“Selama ini kita fokus ke kapal perikanan dengan izin pusat. Tapi dengan sistem *e-logbook*, kami berharap akan dapat menjangkau nelayan kecil yang selama ini datanya nyaris tidak tercatat. DJPT pada tahun ini menargetkan 10.000 kapal akan menerapkan sistem *logbook*,” ujarnya.

Sementara, National Project Officer Program *Enabling Transboundary Cooperation for Sustainable Management of the Indonesian Seas* (ISLME) FAO Muh Lukman mengatakan, Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang memiliki peran dan posisi strategis dalam perikanan dunia. Peran besar tersebut, harus didukung dengan ketersediaan data perikanan yang sama baiknya.

“Indonesia perlu mendapat dukungan dalam perbaikan data perikanan, dan FAO berkomitmen untuk mendukung pengelolaan perikanan Indonesia berbasis wilayah

pengelolaan perikanan,” tegasnya dalam keterangan resmi yang diterima *Mongabay Indonesia*.



Kearifan lokal menjaga laut dijalankan penuh nelayan Aceh dengan tidak menggunakan bom atau pukot harimau. Foto: Junaidi Hanafiah/Mongabay Indonesia

Nelayan Kecil

Oleh itu, melalui kegiatan *Implementation of Capture Fisheries Logbook for Coastal and Small Scale*

Fisheries, FAO berharap bisa berkontribusi pada peningkatan kualitas data perikanan tangkap di seluruh Indonesia. Dengan demikian, rencana pengelolaan perikanan pada akhirnya bisa disusun berdasarkan data, informasi, dan analisis yang akurat.

“Data yang akurat akan menjadi pijakan dalam pengelolaan perikanan skala kecil di Indonesia yang sejauh ini telah mengalami banyak perbaikan,” ungkap dia.

Diketahui, melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/Per-MenKP/2014 tentang Logbook Penangkapan Ikan, ditetapkan bahwa kapal dengan ukuran di atas 5GT wajib melaporkan hasil tangkapan melalui logbook.

Bagi Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, apa yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam memperbaiki kualitas data produksi perikanan tangkap, menjadi bagian dari upaya memperbaiki kondisi dunia perikanan secara keseluruhan. Hal itu, karena DFW Indonesia menduga selama ini sektor tersebut masih diwarnai dengan pelaporan hasil tangkapan ikan dengan nilai di bawah sesungguhnya.

“Kami menduga, kegiatan perikanan di Indonesia juga diwarnai dengan *under-reported*, di mana pelaku usaha melaporkan hasil tangkapan di bawah nilai yang sesungguhnya ditangkap,” jelas peneliti DFW Indonesia Muh Nazaruddin.

Di sisi lain, walau *e-logbook* akan memudahkan nelayan kecil dan nakhoda kapal untuk mencatatkan hasil tangkapan, namun itu juga sebenarnya menjadi tantangan yang sulit. Mengingat, Pemerintah Indonesia ditantang untuk bisa menyebarkan kemudahan tersebut kepada semua nelayan dan pelaku usaha dan menerapkan regulasi yang ada tanpa merasa dipaksa.



Di mata Nazaruddin, walau terlihat mudah, namun perlu ada strategis komunikasi dan sosialisasi atas regulasi sistem *logbook* serta penjelasan kepada pelaku usaha tentang manfaat manajemen yang akan didapatkan jika mereka melaporkan data yang akurat melalui sistem *logbook* manual ataupun *e-logbook*.

Siluet aktivitas warga nelayan disenja hari saat di bibir pantai Kondang Merak, Malang, Jatim.

Penilaian sama juga diungkapkan peneliti DFW Indonesia lainnya, Laode Gunawan. Menurut dia, program pendataan *logbook* dengan dukungan FAO secara penuh, diyakini akan bisa berkontribusi pada peningkatan kapasitas nelayan dan Pemerintah Daerah, sekaligus juga bisa meningkatkan kepatuhan penggunaan *logbook* bagi nelayan.

Bagi Laode, penggunaan *logbook* akan menjadi penting, karena berguna dalam pemetaan komoditas hasil tangkapan, status per wilayah pengelolaan perikanan, dan juga pola penangkapan secara berkala. Selain itu, hasil data *logbook* juga akan lebih berguna jika dianalisis dan menjadi rekomendasi implementasi kebijakan perizinan kapal, alokasi, dan satu sumber daya ikan di WPP RI.